Vol.14/ No.01/ Januari-Juni 2018 ISSN : 0216 - 4396

Jurnal TAPIs

Teropong Aspirasi Politik Islam

Andi Eka Putra
Etika Politik Dan Masalah Kemasyarakatan:
Menuju Etika Pembebasan Dalam Islam

Ratnia Solihah, dkk
Fenomena Fragmentasi Partai Politik Versus
Penerapan Parliamentary Threshold Indonesia

Yanhar Jamaluddin, dkk
Keberlanjutan Kebijakan Dana Desa Di Indonesia

M. Sidi Ritaudin
Peran Tokoh Masyarakat Dalam Meminimalisir
Suara Golput Pada Pemilihan Kepala Desa

Dian Wahyudin
Kolaborasi Dalam City Logistics
Menuju Sustainable Development

Triono
Strategi Political Marketing
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dalam
Pemilu Legislatif 2014 Di Provinsi Lampung

Nadirsah Hawari
Strategi Caleg Dalam Meraih
Dukungan Politik Di Kota Metro Tahun 2014

Abd. Qohar, Ali Abdul Wakhid
Upaya Pimpinan Dalam Meningkatkan
Kinerja Pegawai Di Kantor Kecamatan Sukarame

Diterbitkan Oleh :
PRODI PEMIKIRAN POLITIK ISLAM
FAKULTAS USULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG

Jurnal TAPIs Teropong Aspirasi Politik Islam
Vol.14 No.01 Januari-Juni 2018

DAFTAR ISI

ISSN: 0216-4396

Andi Eka Putra…… 1-13
Etika Politik Dan Masalah Kemasyarakatan:
Menuju Etika Pembebasan Dalam Islam

Ratnia Solihah, dkk……. 14-33
Fenomena Fragmentasi Partai Politik Versus
Penerapan *Parliamentary Threshold* Indonesia

Yanhar Jamaluddin, dkk…… 34-54
Keberlanjutan Kebijakan Dana Desa Di Indonesia

M. Sidi Ritaudin..... 55-72
Peran Tokoh Masyarakat Dalam Meminimalisir
Suara Golput Pada Pemilihan Kepala Desa

Dian Wahyudin…… 73-87
Kolaborasi Dalam *City Logistics*
Menuju *Sustainable Development*

Triono…….. 88-108
Strategi *Political Marketing*
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dalam
Pemilu Legislatif 2014 Di Provinsi Lampung

Nadirsah Hawari…… . 109-138
Strategi Caleg Dalam Meraih
Dukungan Politik Di Kota Metro Tahun 2014

Abd. Qohar, Ali Abdul Wakhid……. 139-156
Upaya Pimpinan Dalam Meningkatkan
Kinerja Pegawai Di Kantor Kecamatan Sukarame

KATA PENGANTAR

Hanya milil Allah-lah segala yang ada di langit dan bumi. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasulullah saw, para sahabat, dan semua pengikutnya ila yaumil akhir.

Di tengah kesibukan menyelesaikan kelengkapan Akreditasi Prodi Pemikiran Politik Islam yang akan berakhir pada bulan September tahun 2018, Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam (TAPIs) yang diterbitkan oleh Prodi Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung kembali hadir dengan segala keterbatasan, tetap semangat dan selalu ingin lebih baik akhirnya bisa terkabulkan. Pada edisi kali ini (Volume 14. No.1 Januari-Juni 2018) ada beberapa tema menarik diantaranya tentang etika politik dan masalah kemasyarakatan, fragmentasi parpol dan persoalan PT, strategi PKS dalam pileg 2014, peran tokoh dalam mengurangi angka golput,termasuk strategi caleg dalam meraih kursi legislatif. Kesemua tema disajikan dengan gaya narasi dan analisa tajam oleh para para penulis sehingga menarik untuk dibaca dan dijadikan bahan diskusi di kalangan dosen dan mahasiswa.

Akhirnya, segala masukan dan kritikan yang bersifat membangun sangat kami nantikan dari para kontributor dan pembaca yang budiman agar jurnal ini makin sempurna.

TAPIs

(Teropong Aspirasi Politik Islam)
Vol.14 No.01 Januari-Juni 2018

Penerbit:
Prodi Pemikiran Politik Islam
Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama
UIN RADEN INTAN LAMPUNG

Penanggungjawab:
Arsyad Sobby Kesuma

Redaktur:
Nadirsah Hawari

Sekretariat
Tin Amalia Fitri

Fotografer
Ambar Dwi Prasekti

Design Grafis:
Dewi Astuti

KEBERLANJUTAN KEBIJAKAN DANA DESA DI INDONESIA

[1]Yanhar Jamaluddin, Asep Sumaryana[2], Budiman Rusli, Rd. Ahmad Buchari

[1]Mahasiswa Pascasarjana Administrasi Publik, FISIP, Universitas Padjadjaran dan Dosen pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP Universitas Islam Sumatera Utara
[2,3,4] Dosen pada Departemen Administrasi Publik, FISIP Universitas Padjadjaran
[1]yanhar15001@mail.unpad.ac.id, [2]asep.sumaryana@unpad.ac.id
[3]budiman9560@gmail.com, [4]ahmad-buchari@yahoo.com

Abstrak

Artikel ini disusun dilatarbelakangi pengelolaan Dana Desa tidak tepat sasaran dan penggunaannya belum optimal. Artikel ini dimaksudkan untuk menganalisis bagaimana keberlanjutan kebijakan Dana Desa di Indonesia. Metode penelitian dengan pendekatan kualitatif sedangkan analisisnya menggunakan analisis aktor, analisis dampak, dan faktor yang mempengaruhi. Analisis aktor menunjukkan; Proses perumusan Kebijakan Dana Desa melibatkan aktor internal birokrasi. Pada proses implementasi, Pemerintah Desa menjadi aktor/institusi yang diuntungkan dan Pemerintah Kabupaten menjadi aktor/institusi yang dirugikan. Sedangkan analisis dampak menunjukkan; dengan kewenangannya, Desa berdiri sendiri dengan rencana programnya sehingga daerah sulit mengintegrasikan program; Program pembangunan Desa tidak sinkron dengan kebijakan pembangunan Daerah (RPJM Daerah). Berdasarkan analisis aktor dan dampak, keberlanjutan kebijakan Dana Desa ditentukan faktor politik dan komitmen aktor kebijakan.

Kata Kunci : Keberlanjutan, Kebijakan, Dana Desa

Pendahuluan

Mewujudkan Desa kuat, maju, mandiri, dan demokratis menjadi cita-cita pemerintah saat ini. Untuk mewujudkannya, peran dan potensi Desa harus diberdayakan. Untuk mencapai cita-cita tersebut pemerintah mengalokasikan sumberdaya anggaran ke setiap Desa, yang kemudian diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Kebijakan Dana Desa merupakan pengembangan dari kebijakan sebelumnya seperti Alokasi Dana Desa (ADD). Program ADD muncul sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dimana ADD dialokasikan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sebelum program ADD telah ada program Dana Bantuan Desa bergulir sejak tahun 1969 yang disediakan pemerintah pusat dalam bentuk Inpres Pembangunan Desa.[3] Dengan demikian, kebijakan Dana Desa adalah suatu kebijakan baru dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan.

Ditinjau dari tujuannya, Kebijakan Dana Desa memiliki kesamaan seperti di Myanmar (2011) yaitu kebijakan *Local Development Funds*,[4] sedangkan di Laos disebut *Village Development Funds*.[5]

---

[3]Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Malang: Setara Press, 2014), h.88

[4]Robertson, Bart, Cindy Joelene and Lauren Dunn, " Local Development Funds in Myanmar: An Initial Review ", Discussion paper no. 9, (*The Myanmar Development Resource Institute's Centre for Economic and Social Development (MDRICESD) and The Asia Foundation*, 2015), h. ii

[5]Paavola, Marjo, " The Impact of Village Development Funds on Community Welfare in the Lao People's Democratic Republic", (Faculty of Agriculture and Forestry of the University of Helsinki, Finlandia, *Publisher: Viikki Tropical Resources Institute (VITRI) University of Helsinki, Finland*, 2012), ISBN 978-952-10-7609-1, ISSN 0786-8170), h. 132